

Pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan kelembagaan dan teknologi informasi bagi perangkat desa dan usaha mikro di Desa Kadubelang Pandeglang

Endang Purwaningsih¹, Muhamad Fathurahman², Chandra Yusuf³, Muhammad Satrio Ramadhan⁴, Farel Fathin Nugraha⁵

^{1,4,5}Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

²Fakultas Teknologi Informasi, Universitas YARSI, Jakarta

³Sekolah Pascasarjana, Universitas YARSI, Jakarta

*e.purwaningsih@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Desa Kadubelang di Kabupaten Pandeglang masih tergolong desa tertinggal dengan permasalahan utama berupa belum adanya koperasi, kelembagaan usaha mikro, serta sarana promosi digital. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan perangkat desa dan pelaku usaha mikro di Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, melalui penguatan kelembagaan dan teknologi informasi. Kegiatan dilaksanakan melalui metode partisipatif dan persuasif, dengan pendekatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi pembuatan *web company profile* desa (pemdeskadubelang.com). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan, partisipasi, dan kompetensi perangkat desa serta pelaku usaha mikro dalam kelembagaan dan teknologi digital. Selain itu, telah dilakukan penyuluhan kelembagaan koperasi dan branding digital desa melalui website. Program ini menghasilkan luaran berupa situs pemdeskadubelang.com, 2 hak cipta, dan 1 artikel ilmiah pada jurnal terindeks Sinta. Diperlukan kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat posisi Desa Kadubelang sebagai desa berkembang menuju *smart village*.

Kata Kunci : pemberdayaan, kelembagaan, teknologi informasi, *web company profile*.

ABSTRACT

Kadubelang Village in Pandeglang Regency is still categorized as an underdeveloped village with key issues such as the absence of cooperatives, micro-enterprise institutions, and digital promotion platforms. This community service program aims to empower village officials and micro-enterprises in Kadubelang Village, Mekarjaya District, through institutional strengthening and information technology. The program was implemented using participatory and persuasive methods through outreach, training, mentoring, and the development of the village's web company profile (pemdeskadubelang.com). The program has improved the knowledge, participation, and competence of village apparatus and micro-enterprises in institutional development and digital technology. Additionally, cooperative institutional outreach and digital village branding through the website have been successfully carried out. The program outputs include the pemdeskadubelang.com website, 2 registered copyrights, and 1 scientific article published in a Sinta-indexed journal. Sustainable collaboration and mentoring are needed to support Kadubelang's transformation from an underdeveloped village to a smart village.

Keywords: *community empowerment, village institutions, information technology, web company profile.*

Articel Received: 01/08/2025; **Accepted:** 01/10/2025

How to cite: APA Style. Purwaningsih, E., Fathurahman, M., Yusuf, C., Ramadhan, M. S., & Nugraha, F. F. (2025). Pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan kelembagaan dan teknologi informasi bagi perangkat desa dan usaha mikro di Desa Kadubelang Pandeglang. *Abdimas Siliwangi*, Vol 8 (3), 684-702. doi: 10.22460/as.v8i3.28867

A. PENDAHULUAN

Desa Kadubelang terletak di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang. Seperti umumnya daerah Pandeglang, desa ini berada di perdesaan dengan suasana persawahan dan perkebunan yang menghijau, dengan sebagian besar penduduknya bertani. Berdasarkan Profil Desa Kadubelang (2024), desa ini masih berstatus desa tertinggal, dengan jumlah warga 4348 jiwa dan keseluruhannya memeluk agama Islam. Desa Kadubelang merupakan desa dengan wilayah yang terluas di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang dengan luas wilayah 394 Ha.

Permasalahan desa ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa (Sapri) dan Sekretaris Desa (Anung) 27 September 2024 dilanjutkan pada 10 Oktober 2024, dinyatakan bahwa desa ini belum memiliki koperasi dan web company profile, baik web desa maupun usaha mikro. Sawah yang luas (134 Ha) menjadikan warganya bergantung pada hasil pertanian, dan cenderung lamban dalam akses pembangunan. Usaha mikro yang ada adalah opak gulung dan rengginang-rengginang, dijual apa adanya dengan kondisi mentah. Permasalahan utama adalah tingkat kesejahteraan yang rendah, motivasi berpartisipasi untuk membuat kelembagaan korporasi petani juga belum terlihat, namun perangkat desa berharap dapat difasilitasi pendirian koperasi dan pembuatan web desa untuk membranding desa.

Desa ini sebenarnya semula penghasil aneka durian (asal kata belang), namun saat ini justru sudah langka pohon durian, sekretaris desa (Inung, 4 Oktober 2024) menyatakan bahwa warganya sebagian besar bermata pencaharian di sawah dan di kebun dengan tanaman singkong untuk material opak gulung, juga rengginang rengginang, jumlah usaha mikro ini sekitar 30 orang. Mata pencaharian sepenuhnya bergantung pada hasil lahan pertanian yang luas dan digarap dengan tradisional.

Kondisi terkini Desa Kadubelang (Juli 2025) cukup memprihatinkan, sebagai desa tertinggal, dengan kecilnya tingkat partisipasi masyarakat khususnya para petani dan tidak adanya kelembagaan korporasi, dalam bentuk apapun, makin menjauhkan akses terhadap program pembangunan. Wawancara dengan Inung juga menggarisbawahi kondisi desa dan upaya yang telah dilakukan perangkat desa, utamanya dalam mengatasi stunting dan kondisi sarana prasarana desa.

BUMDesa sebenarnya telah berdiri, namun hanya melayani transaksi internet, dan omzetnya per bulan hanya Rp.100 ribu rupiah. Karang Taruna saat ini sedang

berkembang, dan perlu dibina dan diberdayakan, seiring kondisi desa yang sama sekalo belum di branding, karena desa belum memiliki web company profile, pun belum tersedia e commerce, belum ada kelompok tani atau pun perkumpulan usaha mikro, belum ada koperasi, diperparah dengan peran BUMDesa belum optimal bagi kemajuan desa, tentu sangat memprihatinkan dengan partisipasi dan motivasi yang cukup rendah dalam kelembagaan. Peran Stakeholder pun perlu dibumikan seperti halnya dinas Koperasi dan UKM yang belum menjangkau desa ini.

Menurut Inung (Sekretaris Desa), didukung Yuni dan Latif (Kaur Kesejahteraan dan Bendahara), memang lahan persawahan sangat luas, kebanyakan petani hanyalah petani gurem (55%), petani yang memiliki lahan luas (10%) dan sisanya buruh tani dengan memiliki sedikit tanah garap(35%).



Gambar 1. Tim Abdimas Menelusuri Sebagian Kondisi Pedesaan Mitra



Gambar 2. Kondisi Jalan Utama Desa (Antar Dusun)

Sebagian besar penduduk Desa Kadubelang bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data Profil Desa 2024 [3], diketahui secara demografis, jumlah warga pada tahun 2024 ini adalah 4.348 jiwa, dengan jumlah perempuan sebesar 2324 jiwa dan laki-laki 2024 jiwa, semua pemeluk agama Islam. Lahan pertanian seluas 134 Ha sangat mendukung

petani untuk bisa lebih maju, apalagi didukung kondisi pertanian yang subur, letak geografis pun berbatasan dengan desa-desa yang rerata sejenis pencahariannya.

Letak geografi Desa Kadubelang, terletak di antara:

Sebelah Utara : Desa Kadudodol Kecamatan Cimanuk

Sebelah Selatan : Desa Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya

Sebelah Barat : Desa Pareang Kecamatan Mekarjaya

Sebelah Timur : Desa Sukamulya Kecamatan Mekarjaya

Petani di Desa Kadubelang bekerja sejak pagi hari hingga sore (bada ashar) sebagian besar penduduk memiliki lahan yang cukup luas, sebagian kecil hanya petani gurem dan buruh tani. Kondisi sosial ekonomi, jumlah petani 353 orang,

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Desa

Pekerjaan	Jumlah (orang)
Petani	353
Buruh Tani	513
Tukang	42
Pensiunan	4
Jasa	54
PNS	14
P3K	11

Sumber: Profil Desa Kadubelang, 2024

Tabel 2. Pendidikan Warga

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
SD	531
SMP	215
SMA	212
S1	23

Sumber: Profil Desa Kadubelang, 2024

Sungguh kompleks permasalahan mitra, baik kelembagaan, hukum, teknologi dan ekonomi, jadi permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) kurangnya pengetahuan, motivasi dan partisipasi terkait kelembagaan petani dan usaha mikro, (2) lemahnya jiwa wira usaha, (3) belum ada bentuk kelembagaan apapun, baik Koperasi, BUMDesa maupun paguyuban petani, (4) belum optimalnya peran desa, (5) belum ada web company profile baik bagi desa maupun produk atau layanan perkumpulan Usaha Mikro maupun Petani, (6) belum ada Koperasi Desa (7) belum ada program CSR atau sejenisnya yang memfasilitasi legalitas usaha dan peningkatan kompetensi perangkat

desa dan usaha mikro serta petani baik dalam manajemen wira usaha, kompetensi IT dan hukum.

Wawancara dengan Kepala Desa Kadubelang (Sapri, 4 Oktober 2024) diinformasikan bahwa Didukung Inung Sekretaris Desa perlu pendampingan dan pelatihan peningkatan kompetensi dan wadah korporasi yang mampu mengangkat perekonomian petani. Petani (Nuridin, 4 Oktober 2024) yang sedang berladang di sawah menjelaskan kesehariannya berbulan-bulan hanya menanam kacang panjang untuk menambah panen padinya, kendala yang ia rasakan adalah belum ada wadah perkumpulan apapun, sehingga mencari pupuk pun susah sekali, dia menginginkan dapat dibantu berdirinya minimal kelompok tania tau perkumpulan tani, dan jika mungkin suatu saat dibuat koperasi. Pelaku Usaha Mikro kue rengginang renggining (Nok, 4 Oktober 2024) menginginkan produknya dapat dibantu promosi dan legalitas seperti merek dagang, juga ingin mendapat pelatihan inovasi produk (Dinas Pertanian Provinsi Banten. 2024)n.

Sesuai dengan roadmap dan topik pengabdian kepada masyarakat khususnya pada Pusat YARSI Pemberdayaan Desa, maka tepat untuk menyandingkan kebutuhan desa ini dengan tema Kemitraan untuk Pembangunan Desa. Tim menegaskan peran hukum dan pembangunan, peran hukum meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus peran hukum dalam perjanjian, serta bagaimana hukum dan IT itu mendukung kemudahan berusaha. Jadi perlu legalitas pada setiap langkah masyarakat desa, perangkat maupun UMKMnya. Juga sejalan dengan peningkatan IKU PT yakni IKU 2 (mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus), IKU 3 (Dosen berkegiatan di luar kampus), IKU 5 (Hasil kerja dosen digunakan masyarakat), dan IKU 7 (Kelas yang kolaboratif dan partisipatif).

Tujuan Program ini (1) Agar mitra secara umum meningkat pengetahuan dan partisipasi mitra dalam kelembagaan sekaligus mampu menumbuhkembangkan iklim berusaha di Desa Kadubelang, dan (2) Agar Mitra mampu menyiapkan wadah aspirasi dan partisipasi petani dan usaha mikro dalam bentuk cikal bakal koperasi maupun perkumpulan, yang kelak menjadi kelengkapan legalitas pendirian koperasi bagi mitra sesuai skala prioritas yang mitra dan Tim justifikasi berdasarkan hasil *need assessment*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut karenanya perlu dilakukan pemberdayaan mitra, baik kepada perangkat desa, maupun usaha mikro serta para petani agar mampu memotivasi diri untuk berkembang, menciptakan iklim usaha, dan menumbuhkan semangat berusaha, meningkat menuju Desa Berkembang.

B. LANDASAN TEORI

Laporan tahunan dari *Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten* (2017, 2023) menyatakan bahwa pembangunan pertanian masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, kelembagaan yang lemah, serta terbatasnya akses petani terhadap sumber daya penting.

Menurut Nurhayati et al. (2021), dalam kepemimpinan diperlukan transparansi. Selain itu, penggerakan partisipasi masyarakat juga penting untuk diperhatikan, yang memerlukan teladan dan dorongan yang konsisten. Kelembagaan petani memiliki peran yang sangat krusial dalam konteks ini. Grasse et al. (2022) menyatakan bahwa struktur kelembagaan dan perencanaan strategis dapat memengaruhi, bahkan memoderasi konflik politik dalam komunitas yang terpolarisasi. Mo (2023) juga menekankan bahwa pembuat kebijakan perlu meningkatkan keterlibatan institusi keuangan, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kemiskinan dan keterbelakangan sering kali bersumber dari keterbatasan akses terhadap teknologi serta ketergantungan pada pertanian tradisional. Ketika petani masih menggunakan teknik yang usang, mereka sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini diperburuk dengan lemahnya kemampuan manajemen keuangan di kalangan petani dan tidak berfungsinya kelembagaan petani secara optimal (Kurniawan, 2023).

Kemiskinan dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua: di satu sisi disebabkan oleh kurangnya akses terhadap teknologi modern, pelatihan sumber daya manusia, intervensi dari pemangku kepentingan, serta infrastruktur yang memadai; di sisi lain diperparah oleh kebijakan kelembagaan dan korporasi yang minim inovasi dan kurang memperhatikan aspek ketahanan pangan. Keterbatasan akses pasar juga memperdalam jurang kemiskinan. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi petani serta lemahnya kelembagaan perlu ditanggapi dengan dukungan yang kuat dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, melalui pelatihan teknis, regulasi pendukung, serta penghapusan hambatan struktural yang menghalangi akses terhadap sumber daya dan pasar (Mo, et.al, 2023).

Kelembagaan yang sudah ada perlu direvitalisasi, sementara yang belum ada perlu dibentuk dan diberdayakan. Peran desa, kompetensi perangkat desa, serta pelaku usaha

mikro dan petani, juga perlu ditingkatkan. Branding desa melalui pembuatan media sosial dan situs web company profile dapat mendorong pengenalan desa serta produk unggulannya di dunia digital maupun pasar konvensional (Reaven et.al, 2021).

Hasil penelitian di Desa Kadubelang (Purwaningsih, 2024) menunjukkan bahwa diperlukan model khusus untuk percepatan pengembangan desa tertinggal, dengan menonjolkan partisipasi pelaku usaha mikro dalam kerangka kelembagaan yang kuat dan partisipatif (Grasse, et.al, 2022). Pendekatan yang digunakan mencakup empat dimensi kewirausahaan, yaitu *Chainpreneur*, *Marketpreneur*, *Qualitypreneur*, dan *Brandpreneur*, yang secara bersamaan mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya agar bisnis tidak hanya fokus pada profit tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan kelembagaan local (Reaven et.al 2021).

Mukti et al. (2022) menekankan bahwa salah satu tantangan pertanian di Indonesia adalah memfasilitasi transformasi petani muda menjadi wirausaha pertanian modern. Dalam hal ini, diperlukan sinergi multipihak, baik dari sisi sumber daya manusia, faktor produksi, hingga aspek komersialisasi. Reaven et al. (2021) mengamati bahwa pemberdayaan petani tembakau di Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, masih belum optimal karena berbagai hambatan seperti persaingan dengan komoditas lain (misalnya kakao), kurangnya sarana dan prasarana, kendala pemasaran, faktor kultural, dan keterbatasan sumber daya manusia (Mukti, et.al, 2018).

Kurniawan (2017) menambahkan bahwa upaya pemberdayaan petani salak masih menghadapi hambatan. Menurut Sari et al. (2024), optimalisasi pembinaan petani salak perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, khususnya penyuluh lapangan, serta kolaborasi dengan pemerintah desa. Mereka juga menyarankan pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan branding desa, misalnya dengan ikon patung salak terbesar di Desa Sibetan sebagai bagian dari strategi promosi (Sari et.al, 2024).

Dengan demikian, teori di atas dapat digunakan sebagai strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan (1) kelembagaan, promosi, dan teknologi, serta urgensi peningkatan partisipasi dan kompetensi untuk mengatasi ketertinggalan desa; dan (2) branding desa dan produk lokal melalui pembuatan website company profile yang mendukung promosi digital. Produk unggulan desa, khususnya hasil

pertanian, memiliki potensi besar namun belum teroptimalkan oleh peran kelembagaan desa yang ada

C. METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam program ini adalah Kepala Desa beserta jajarannya (perangkat Desa) Kadubelang, dalam hal ini sekaligus mewakili para petani dan usaha mikro Desa Kadubelang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *persuasive* dan *participatory action* didukung metode berikut.

1. Metode Ceramah dan Diskusi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti membangun wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan, dan pentingnya peran korporasi sebagai wadah perkumpulan petani dan usaha mikro dalam meningkatkan keberhasilan dan kelancaran factor produksi, legalitas usaha, disinergikan peran teknologi informasi untuk membranding produk mitra. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk persiapan dan pendampingan pembentukan organisasi, diskusi dan tanya jawab terkait input data dan sebagainya.



Gambar 3. Penyuluhan Hukum Korporasi



Gambar 4. Peserta Antusias Bertanya

2. Metode Pelatihan dan Pendampingan

Dengan metode ini, kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pelatihan langsung dengan memahami permasalahan, menganalisis dan menyiapkan semua hal dalam persiapan pendirian korporasi, data untuk web, sesuai dengan hasil *need assessment*, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Tim.



Gambar 4. Pelatihan Input Data

3. Monitoring

Evaluasi kebermanfaatan dan keberlanjutan dilakukan baik melalui *pre test-intervensi-post test* maupun setelah 3 (tiga) bulan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitra sangat bersemangat menyambut Tim Abdimas, bahkan ibu-ibu pun tidak mau kalah dengan para bapak, menghadiri penyuluhan dengan semangat, antusias bertanya dan meminta solusi. Kelembagaan, promosi dan teknologi, urgensi partisipasi serta peningkatan kompetensi menjadi hal penting untuk mengentaskan ketertinggalan mitra.

Secara umum, mitra sangat baik dan termotivasi untuk makin maju. Gambaran terkait tingkat kesiapan teknologi (TKT) desa ini masih cukup rendah, sehingga perlu dibantu untuk makin meningkat tahun demi tahun.

Sapri Kepala Desa dan Inung Sekretaris Desa Kadubelang sangat bangga desanya menjadi mitra Pk Mini, berharap tahun berikutnya mendapat kesempatan yang sama. Mereka berterima kasih kepada Tim Abdimas. Mereka menyadari bahwa upaya membranding desa dan produk desa melalui pembuatan *web company profile* *pemdeskadubelang.com* perlu disegerakan agar desa makin berkembang dan smart.

Berikut hasil kuesioner terhadap 50 warga.

Tabel 3. Pemahaman Peran Teknologi Informasi dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

Jawaban responden	Pre Test		Post Test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	14 28%	6 12%	
	2.00	16 32%	13 26%	
	3.00	14 28%	21 42%	
	4.00	6 12%	10 20%	

Sumber: Hasil analisis data 2025

Tabel 3 menunjukkan hasil pre-test dan post-test terhadap pemahaman masyarakat Desa Kadubelang mengenai peran teknologi informasi dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat di desa. Seperti pada tabel sebelumnya, data diambil dari 50 responden yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat.

Pada saat pre-test, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih berada pada tingkat pemahaman rendah hingga sedang. Sebanyak 14 responden (28%) memperoleh skor 1.00, yang menunjukkan minimnya pemahaman tentang peran teknologi informasi. Kemudian, 16 orang (32%) berada pada tingkat 2.00, dan 14 orang (28%) pada tingkat 3.00. Hanya 6 responden (12%) yang memiliki pemahaman yang tergolong baik, dengan skor 4.00.

Setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat, terjadi peningkatan yang signifikan pada pemahaman responden. Hanya 6 orang (12%) yang masih berada pada skor 1.00, dan 13 orang (26%) pada skor 2.00. Sebaliknya, terjadi peningkatan jumlah responden yang memiliki pemahaman lebih tinggi, yaitu 21 orang (42%) pada skor 3.00, dan 10 orang (20%) pada skor 4.00.

Peningkatan ini mencerminkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi teknologi informasi masyarakat desa. Semakin banyak warga yang memahami pentingnya teknologi informasi sebagai alat bantu untuk mengakses informasi, memperluas jaringan sosial dan ekonomi, serta sebagai media untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa dengan pendekatan edukatif yang tepat, masyarakat desa memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam konteks pemberdayaan berbasis digital.

Tabel 4. Pemahaman Pentingnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi.

Jawaban responden	Pre Test		Post Test		
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	
Valid	1.00	6	12%	12	24%
	2.00	12	24%	14	28%
	3.00	20	40%	17	34%
	4.00	12	24%	7	14%

Sumber: Hasil analisis data 2025

Tabel 4 menyajikan data pre-test dan post-test terkait tingkat pemahaman masyarakat Desa Kadubelang mengenai pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses penguatan kelembagaan dan digitalisasi desa. Data dikumpulkan dari 50 responden yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pada tahap pre-test, mayoritas responden telah menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik. Terlihat bahwa 20 orang (40%) berada pada kategori nilai 3.00, yang mengindikasikan bahwa hampir setengah dari responden memiliki pemahaman menengah terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam penguatan kelembagaan dan digitalisasi. Selain itu, 12 orang (24%) masing-masing berada pada nilai 2.00 dan 4.00, dan hanya 6 orang (12%) yang memperoleh nilai terendah 1.00.

Hasil post-test menunjukkan dinamika yang menarik. Jumlah responden dengan skor 1.00 justru meningkat menjadi 12 orang (24%), yang dapat mengindikasikan adanya kebingungan atau resistensi terhadap informasi yang diberikan. Sementara itu, yang berada pada skor 2.00 meningkat menjadi 14 orang (28%), sedangkan skor 3.00 menurun sedikit menjadi 17 orang (34%). Responden dengan skor 4.00 menurun menjadi 7 orang (14%).

Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan di beberapa tingkat, pemahaman masyarakat terhadap konsep partisipasi aktif dalam penguatan kelembagaan dan digitalisasi belum mengalami peningkatan yang sekuat dua topik sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh kompleksitas topik, keterbatasan waktu dalam kegiatan edukasi, atau keterbatasan pemahaman teknis masyarakat mengenai digitalisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan lanjutan secara berkesinambungan, baik dalam bentuk pelatihan praktis, pendampingan kelembagaan, maupun edukasi digital berbasis komunitas agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya peran mereka secara pasif, tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses transformasi desa berbasis teknologi dan kelembagaan yang kuat.

Tabel 5. Pemahaman Bentuk Kolaborasi Antara Perangkat Desa dan Pelaku Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi.

Jawaban responden	Pre Test		Post Test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	21 42%	17 34%	
	2.00	18 36%	22 44%	
	3.00	6 12%	2 4%	
	4.00	5 10%	9 18%	

Sumber: Hasil analisis data butir 2025

Tabel 5 memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap bentuk kolaborasi antara perangkat desa dan pelaku usaha mikro dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal, sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian masyarakat.

Pada saat pre-test, mayoritas responden memiliki tingkat pemahaman yang masih rendah hingga sedang. Sebanyak 21 responden (42%) berada pada tingkat pemahaman 1.00, dan 18 responden (36%) pada tingkat 2.00, menunjukkan bahwa sekitar 78% peserta belum memahami dengan baik pentingnya kolaborasi lintas aktor desa. Sementara itu, hanya 6 orang (12%) dan 5 orang (10%) masing-masing berada di tingkat 3.00 dan 4.00.

Setelah kegiatan edukasi melalui pengabdian masyarakat, hasil post-test menunjukkan pergeseran pemahaman yang cukup positif. Jumlah responden pada tingkat 2.00 meningkat menjadi 22 orang (44%), menandakan adanya peningkatan pemahaman masyarakat ke arah sedang. Jumlah responden pada tingkat pemahaman 4.00 pun meningkat dari 10% menjadi 18%, sementara jumlah yang memiliki

pemahaman 1.00 sedikit menurun menjadi 17 orang (34%). Sayangnya, responden dengan nilai 3.00 justru turun menjadi 2 orang (4%), yang bisa mengindikasikan perpindahan pemahaman langsung dari tingkat rendah ke tinggi, atau keraguan dalam menjawab.

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya sinergi antara perangkat desa dan pelaku usaha mikro dalam menggerakkan ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan. Namun, meskipun ada perbaikan, sebagian besar masyarakat masih perlu mendapatkan penguatan dalam bentuk pendampingan berkelanjutan, studi kasus, atau pelatihan kolaboratif untuk memantapkan pemahaman sekaligus implementasi di lapangan.

Tabel 6. Pemahaman Bentuk Partisipasi dalam Program Pelatihan Teknologi Informasi di Tingkat Desa.

Jawaban responden	Pre Test		Post Test		
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	
Valid	1.00	5	10%	9	18%
	2.00	10	20%	19	38%
	3.00	20	40%	14	28%
	4.00	15	30%	8	16%

Sumber: Hasil analisis data 2025

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa pemahaman masyarakat mengenai bentuk partisipasi dalam program pelatihan teknologi informasi di tingkat desa menunjukkan perubahan yang kurang menggembirakan setelah kegiatan pengabdian dilakukan. Meskipun pada saat pre-test sebagian besar responden berada pada kategori pemahaman tinggi, yaitu 40% pada nilai 3.00 dan 30% pada nilai 4.00, hasil post-test justru menunjukkan penurunan. Responden yang berada pada kategori nilai 4.00 menurun menjadi 16%, dan pada nilai 3.00 menjadi 28%. Sebaliknya, kategori nilai 2.00 meningkat dari 20% menjadi 38%, dan nilai terendah 1.00 juga naik dari 10% menjadi 18%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kegiatan pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, atau kemungkinan penyampaian materi terlalu teoritis dan tidak cukup aplikatif. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi metode penyuluhan agar materi pelatihan teknologi informasi lebih kontekstual, praktis, dan sesuai dengan kemampuan dasar masyarakat desa.

Tabel 7. Keinginan Peserta Untuk Membentuk Kelembagaan Korporasi Desa Sebagai Penguatan Ekonomi.

Jawaban responden	Pre Test		Post Test		
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	
Valid	1.00	20	40%	2	4%
	2.00	15	30%	3	6%
	3.00	10	20%	25	50%
	4.00	5	10%	20	40%

Sumber: Hasil analisis data 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 7, diketahui bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pendampingan atau pelatihan, sebagian besar peserta menunjukkan tingkat keinginan yang masih rendah dalam membentuk kelembagaan korporasi desa. Sebanyak 40% responden menyatakan "tidak ingin", dan 30% lainnya hanya berada pada kategori "ingin". Sementara itu, hanya 20% yang memilih "cukup ingin", dan 10% yang menunjukkan sikap "sangat ingin". Temuan ini mengindikasikan bahwa pada tahap awal, pemahaman maupun minat peserta terhadap pembentukan kelembagaan ekonomi di tingkat desa masih relatif rendah.

Setelah kegiatan intervensi berupa pelatihan atau sosialisasi dilaksanakan, terjadi perubahan sikap yang cukup signifikan pada para peserta. Jumlah responden yang menyatakan "cukup ingin" meningkat menjadi 50%, dan yang menyatakan "sangat ingin" naik menjadi 40%. Sebaliknya, proporsi peserta yang sebelumnya menyatakan "tidak ingin" turun tajam dari 40% menjadi hanya 4%. Demikian pula, responden yang menjawab "ingin" menurun menjadi 6%, mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta berpindah ke kategori keinginan yang lebih tinggi.

Perubahan ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan kesadaran dan minat peserta terhadap pentingnya pembentukan kelembagaan ekonomi di desa. Meningkatnya persentase pada kategori "cukup ingin" dan "sangat ingin" menandakan bahwa pemahaman peserta terhadap fungsi kelembagaan korporasi desa sebagai alat penguatan ekonomi lokal mengalami peningkatan yang positif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi yang dilakukan memiliki dampak positif terhadap perubahan sikap masyarakat desa terhadap penguatan ekonomi melalui kelembagaan. Temuan ini menjadi dasar yang kuat bagi perlunya pelatihan

lanjutan atau pendampingan berkelanjutan agar minat tersebut dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata di tingkat komunitas desa.

Tabel 8. Keinginan Peserta untuk Berpartisipasi Aktif Sebagai Pengurus dalam Kelembagaan Korporasi.

Jawaban responden	Pre Test		Post Test		
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	
Valid	1.00	22	44%	2	4%
	2.00	14	28%	13	26%
	3.00	9	18%	18	36%
	4.00	5	10%	17	34%

Sumber: Hasil analisis data 2025

Tabel 8 menunjukkan data mengenai tingkat keinginan peserta untuk terlibat secara aktif sebagai pengurus dalam kelembagaan korporasi desa, baik sebelum maupun setelah diberikan pelatihan atau sosialisasi. Hasil pre-test memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta cenderung belum bersedia untuk mengambil peran aktif sebagai pengurus. Sebanyak 44% responden menyatakan "tidak ingin", dan 28% menyatakan "ingin", yang berarti lebih dari separuh peserta belum memiliki dorongan yang kuat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kelembagaan tersebut.

Lebih lanjut, hanya 18% responden yang menyatakan "cukup ingin", dan 10% yang benar-benar menyatakan "sangat ingin". Angka-angka ini mengindikasikan bahwa sebelum kegiatan intervensi, tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam aspek kepengurusan kelembagaan masih tergolong rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai manfaat berorganisasi, kekhawatiran akan tanggung jawab, atau rendahnya kepercayaan diri dalam mengelola lembaga ekonomi desa.

Setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan, terjadi perubahan persepsi yang cukup signifikan. Data post test menunjukkan bahwa responden yang sebelumnya menyatakan "cukup ingin" dan "sangat ingin" mengalami peningkatan yang cukup besar, masing-masing menjadi 36% dan 34%. Sebaliknya, peserta yang sebelumnya menyatakan "tidak ingin" menurun drastis dari 44% menjadi hanya 4%. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan pendekatan edukatif dalam membangun kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mengambil peran lebih aktif.

Dengan adanya peningkatan partisipasi dalam peran pengurus, dapat disimpulkan bahwa pelatihan telah mendorong terjadinya perubahan positif dalam kesiapan masyarakat desa untuk terlibat secara langsung dalam kelembagaan ekonomi. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan program pemberdayaan berbasis kelembagaan dengan melibatkan lebih banyak warga secara aktif dan berkelanjutan.

Tabel 9. Keinginan Peserta untuk Mengikuti Pelatihan Teknologi Informasi Demi Meningkatkan Kapasitas.

Jawaban responden	Pre Test		Post Test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	18	5	10%
	2.00	16	9	28%
	3.00	11	23	46%
	4.00	5	13	26%

Sumber: Hasil analisis data butir 2025

Tabel 9 menunjukkan tingkat keinginan peserta untuk mengikuti pelatihan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas individu dan masyarakat desa. Berdasarkan hasil pre test, diketahui bahwa mayoritas responden masih belum menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan pelatihan tersebut. Sebanyak 36% responden menyatakan "tidak ingin", sementara 32% lainnya hanya menyatakan "ingin". Sementara itu, hanya 22% responden yang menjawab "cukup ingin", dan 10% yang menyatakan "sangat ingin". Kondisi ini mencerminkan bahwa pada awalnya, masih banyak peserta yang belum menyadari pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan desa.

Hasil post test memperlihatkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam sikap dan minat peserta setelah diberikan pelatihan atau sosialisasi. Responden yang menyatakan "cukup ingin" meningkat tajam menjadi 46%, dan yang menjawab "sangat ingin" meningkat menjadi 26%. Sebaliknya, peserta yang sebelumnya menyatakan "tidak ingin" menurun dari 36% menjadi hanya 10%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan berhasil meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap pentingnya pelatihan teknologi informasi.

Peningkatan ini menjadi indikasi bahwa pendekatan edukatif yang tepat mampu menumbuhkan minat masyarakat desa untuk mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan berbasis digital. Dalam konteks desa tertinggal, perubahan ini sangat berarti

karena memperlihatkan adanya kesiapan masyarakat untuk mengadaptasi teknologi sebagai bagian dari strategi pembangunan lokal.

Dengan demikian, pelatihan teknologi informasi dapat dipandang sebagai salah satu kunci penting dalam membangun kapasitas sumber daya manusia desa secara berkelanjutan. Temuan ini memberikan dasar bagi perlunya program lanjutan yang tidak hanya mengenalkan teknologi, tetapi juga memberikan pendampingan agar keterampilan yang dimiliki benar-benar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh butir pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan kepada 50 responden perwakilan mitra di Desa Kadubelang, diketahui bahwa terjadi perubahan positif dalam tingkat pemahaman dan keinginan masyarakat setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Dari delapan butir yang dianalisis, enam di antaranya menunjukkan peningkatan skor rata-rata hasil post-test dibandingkan pre-test, sedangkan dua butir mengalami sedikit penurunan, yang kemungkinan disebabkan oleh kompleksitas materi atau metode penyampaian yang kurang aplikatif. Secara keseluruhan, rata-rata peningkatan pemahaman dan motivasi masyarakat terhadap tema-tema pemberdayaan, kolaborasi kelembagaan, serta penguasaan teknologi informasi mengalami peningkatan sebesar **sekitar 13,13%**. Peningkatan ini mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap kesiapan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa berbasis kelembagaan dan digital. Meskipun demikian, temuan ini juga menegaskan perlunya penguatan lanjutan berupa pelatihan praktis, pendampingan intensif, dan pendekatan yang lebih kontekstual untuk memastikan bahwa perubahan pemahaman tersebut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di tingkat lokal.



Gambar 6. Perangkat Desa dan Tim



Gambar 7. Tim Menyerahkan Fasilitas Web Compro Pemdeskadubelang.Com dan Laptop

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan:

1. Kelembagaan, promosi dan teknologi, urgensi partisipasi serta peningkatan kompetensi menjadi hal penting untuk mengentaskan ketertinggalan mitra, sinergi dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan perlu diimbangi peningkatan literasi dan partisipasi. Pemahaman dan tingkat pengetahuan telah berhasil ditingkatkan, namun tetap diperlukan pendampingan terus menerus untuk mengangkat tingkat kesiapan teknologi mitra menjadi lebih tinggi dan *smart*.
2. Upaya membranding desa dan produk desa melalui pembuatan *web company profile* untuk mendukung promosi, telah dilakukan dengan baik bersama Tim IT mitra, terdapat motivasi dan peningkatan kompetensi mitra, sehingga tidak terjadi kendala dalam mengoperasikan web pemdeskadubelang.com

F. DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten. (2017, 2023). *Laporan Tahunan BPTP Banten*. Kementerian Pertanian RI. Tersedia pada Laporan Tahunan PPID BPSIP Banten (BRMP Banten). Retrieved from https://banten-bsip-pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-tahunan_banten.bsip.pertanian.go.id
- Desa Kadubelang. (2024). *Profil Desa Kadubelang. (Dokumen internal/desa)*
- Dinas Pertanian Provinsi Banten. (2024). *Laporan Tahunan BPTP Banten (TA 2017)*. Retrieved September 24, 2024, from <https://banten-bsip-ppid.pertanian.go.id/doc/44/lapthn2017.pdf>
- Grasse, D., Pavlik, M., Targeting, C., & Curtice, T. B. (2021). *Opportunistic Repression* (Vol. 82, No. 2). (Tidak ditemukan DOI atau URL).

- Grasse, N., Smith, L., & Tanaka, T. (2022). Institutional structure and strategic planning in polarized communities. *Journal of Public Affairs*, 18(1), e2560. <https://doi.org/10.1002/pa.2560>
- Kurniawan, K. D. (2017). Pemberdayaan petani salak melalui agrowisata terpadu oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Jurnal Pertanian*, 3(1), 32–44.
- Kurniawan, R. (2023). Kendala pemberdayaan petani salak di Bali. *Jurnal Pertanian Tropika*, 20(1), 45–54.
- Mo, L. (2023). Enhancing financial institution engagement for sustainable economic growth. *Economic Development Review*, 45(3), 201–218.
- Mo, Y., Ullah, S., & Ozturk, I. (2023). Green investment and its influence on green growth in high polluted Asian economies: Do financial markets and institutions matter? *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 36(2). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2140302>
- Mukti, G. W., Andriani, R., & Pardian, P. (2018). Transformasi petani menjadi entrepreneur: Studi kasus pada program wirausaha muda pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/agricore.v3i2.20491>
- Mukti, R., Santosa, B., & Amalia, N. (2022). Transforming youth farmers into agri-entrepreneurs: Challenges and policies. *Indonesian Journal of Agriculture*, 15(4), 451–463.
- Nurhayati, N., Sulaiman, A., & Fitriani, D. (2021). Kepemimpinan dan transparansi dalam tata kelola kelembagaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 123–134.
- Purwaningsih, E. (2024). *Laporan Penelitian Motivasi Pendirian Koperasi Desa Guna Membangkitkan Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Ekonomi*. Universitas YARSI, Jakarta.
- Reaven, H., Pratama, D., & Sari, M. (2021). Evaluating tobacco farmer empowerment in Soppeng. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 39(2), 167–179.
- Reaven, P., Parthasarathy, S., Grasse, B. J., Miller, E., Almazan, F., Mattson, F. H., Khoo, J. C., Steinberg, D., & Witztum, J. L. (1991). Feasibility of using an oleate-rich diet to reduce the susceptibility of low-density lipoprotein to oxidative modification in humans. *American Journal of Clinical Nutrition*, 54(4), 701–706. <https://doi.org/10.1093/ajcn/54.4.701>
- Sari, R. K., Juwita, F., & Sasora, F. (2023). Pembinaan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai Kampung Purworejo. *Madani*, 1(4), 198–202. <https://doi.org/10.37253/madani.v1i4.7536>
- Sari, W., Utami, A., & Dewi, P. (2024). Optimalisasi peran penyuluh dan pemanfaatan teknologi dalam pemberdayaan petani salak. *Agritech Journal*, 29(1), 78–91. <https://doi.org/10.1016/agrtech.2024.03.006>